



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 100 /555/ 2021  
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman nomor 102/555/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman, menyatakan bahwa Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 120 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 1 Tahun 2021;
13. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 102/555/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

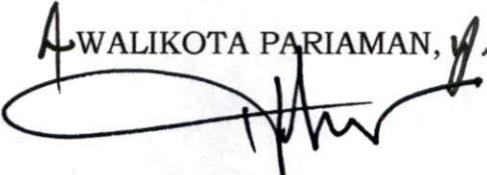
KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

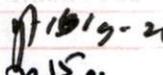
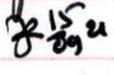
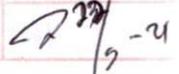
KETIGA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman telah diumumkan pada [www.ppid.pariamankota.go.id](http://www.ppid.pariamankota.go.id) sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Pariaman.

KEEMPAT: segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.

KELIMA : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 20 September 2021

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR *af*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 15/9-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 15/9-21
WAKIL HUKUM & HAM	
KANUBAG PERUNDANG- MUDA	 15/9-21

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN****NOMOR : 290 /555/ 2021****TANGGAL : 20 September 2021****TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**

<b>DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN</b>					
<b>DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN</b>					
<b>NO</b>	<b>RINGKASAN ISI INFORMASI</b>	<b>DASAR HUKUM</b>	<b>BATAS WAKTU</b>	<b>KONSEKUENSI</b>	
			<b>PENGECUALIAN</b>	<b>AKIBAT BILA DIBUKA</b>	<b>MANFAAT JIKA DITUTUP</b>
1	Arsip daftar orang yang masuk G30S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf j; - UU no 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h;	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
2	Peta lokasi Penyimpanan Arsip	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf i; - UU no 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;	Selama masih berlaku	Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga
3	Arsip dinamis;(aktif dan inaktif)	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ; UU no 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2);	Selama masih berlaku	Menghambat proses penegakan hukum	Menyediakan data lengkap yang dilindungi
4	Data Pribadi Penduduk	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf i; - UU no 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3);	sampai terbitnya keputusan pejabat berwenang	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang

5	Database objek dan subjek pajak dan retribusi	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 40; - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j;	Sampai ada perintah dari penegak hukum/pihak yang berwenang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi database objek pajak dan retribusi
6	Dokumen proses pengadaan barang/jasa pemerintah	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan huruf j;	sampai diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dan etika pengadaan
7	Daftar Harga Perkiraan sendiri (HPS)	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan huruf j;	sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan barang/jasa
8	Dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan huruf j;	Selama proses pengadaan barang/jasa	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran
9	Laporan pajak pribadi	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan huruf j;	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi/data kekayaan seseorang	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi seseorang
10	Laporan keuangan daerah yang belum diaudit	- UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 ayat (1); - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j;	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
11	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan

12	Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c; - UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber dan metode intelijen yang sensitif	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara /stabilitas daerah dan wilayah
13	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkat kepala/wakil kepala daerah	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	sampai dengan penerbitan SK	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14	Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/pimpinan DPRD	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	sampai dengan penerbitan SK	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
15	Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti antar waktu anggota/pimpinan DPRD	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	sampai dengan penerbitan SK	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
16	Daftar hasil uji kompetensi PNS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
17	Dokumen hasil sidang Baperjakat	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf i;	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
18	Daftar Pejabat yang akan dilantik	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Sampai yang bersangkutan dilantik	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

19	Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/pejabat	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
20	Data hasil check up perorangan PNS/pejabat	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
21	Data hasil evaluasi kinerja PNS/pejabat	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
22	Hasil evaluasi tenaga Pengajar dan Peserta Diklat	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
23	Data PNS yang diduga melanggar disiplin	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan huruf h;	sampai ada keputusan tetap	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia seorang PNS	Memperlancar proses penegakan hukum dan menjaga rahasia pribadi seorang PNS
24	Data rencana penempatan PNS/CPNS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
25	Dokumentasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
26	SK Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK pelantikan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
27	Instrumen tes potensi/kompetensi PNS/pejabat	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi/kompetensi PNS	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

28	Keputusan Penjatuhan Hukuman disiplin	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i;	Tidak Terbatas	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia seorang PNS	Membantu kelancaran proses penegakan hukum dan melindungi rahasia pribadi seorang PNS
29	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	setelah terbitnya surat izin perceraian	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia seorang PNS	Membantu kelancaran proses penegakan hukum dan melindungi rahasia pribadi seorang PNS
30	Informasi mengenai rincian data kepegawaian seseorang	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi kerahasiaan data PNS
31	Soal-Soal Tes CPNS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	sampai selesai tes pelaksanaan Tes	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
32	Daftar Penderita HIV/AIDS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
33	Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	- UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, pasal 47 ayat (2); - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf i; - UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 57 ayat (1)	Sampai ada hakim/pengadilan	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
34	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf i; - UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 57 ayat (1)	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien

35	Identifikasi subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf i; - UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 44 ayat (3)	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian	Mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
36	Rahasia kedokteran/penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	- UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, pasal 48 dan pasal 51 huruf c; - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat (3) huruf d dan pasal 17 huruf h dan huruf i;	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Melanggar rahasia jabatan dan mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
37	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	- UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, pasal 9 ayat (2); - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h dan huruf i;	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
38	Hasil audit terkait dengan medical error	- UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, pasal 9 ayat (2) dan pasal 74; - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf i;	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
39	Daftar sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	- UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal 33 dan pasal 34; - UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 14; UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 98 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i;	Sampai ada persetujuan tertulis dari pejabat berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
40	Daftar Hasil tes kemampuan fisik	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang

41	Proses scanning UN/UNPK/UASBIN	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia pribadi seseorang
42	Hasil research and development di bidang IPTEK dan olahraga	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b;	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI	Dapat mengganggu proses kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
43	Dokumen Perizinan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap data perusahaan/perseorangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan/perseorangan yang bersifat rahasia
44	Catatan Penilaian review terhadap riset unggulan daerah	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i;	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
45	Data debitur dana bergulir	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 3;	Sampai ada izin tertulis dari debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan
46	Data keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 3;	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik IKM dan UMKM	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan
47	Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan pestisida	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a;	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Proses penegakan hukum berjalan lancar

48	Informasi Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a;	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak yang bersengketa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
49	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a;	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
50	Data teknis potensi air tanah	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf d;	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	Dapat mengungkap rahasia kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengeluaran SDA
51	Data Costumer, data lapangan dan data hasil pengujian Laboratorium lingkungan	- ISO 1705 2017 - SNI Tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi, Klausal 4.2 Kerahasiaan	Sampai ada persetujuan tertulis dari customer atau ada permintaan tertulis dari pihak penyidik	Dapat mengungkap rahasia seseorang/badan usaha	melindungi rahasia seseorang atau badan usaha
52		- Permen LH No.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan, Persyaratan Umum No.2			
53	Daftar korban yang dirujuk ke pelayanan sosial khusus	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari korban	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang/mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Melindungi rahasia pribadi seseorang
54	Hasil diagnosa bedah kasus kelayan penyandang HIV/AIDS dan eks WTS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang

55	Data Penyandang HIV/AIDS dan Eks WTS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang/mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Melindungi rahasia pribadi seseorang
56	Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan/nota Pemeriksaan dan BAP	- UU No 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU pengawasan perburuhan tahun 1948 NR 23 dari RI untuk seluruh Indonesia, Pasal 5; -UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I dan huruf j;	Sampai ada persetujuan tertulis dari pimpinan perusahaan	Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan	Melindungi hak pribadi pengusaha
57	Lokasi Server	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 25;	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan dapat menimbulkan tindakan kriminal	Melindungi hak atas kekayaan intelektual serta mengamankan data dan perangkat IT
58	Internet Protokol/IP Anddres Private	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 25; - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan huruf j;	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan dapat menimbulkan penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual serta hak akses
59	Informasi Keamanan Jaringan Dan Database	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 25;	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu keamanan data dan rahasia negara	Melindungi Data Rahasia
60	Sistem Management Database	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 25; - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan huruf j;	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	Melindungi hak atas kekayaan intelektual serta menjaga keamanan jaringan komputer

61	User/barcode Tanda tangan elektronik	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 25; - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan huruf j;	Selama masih digunakan	Menghindari penyalahgunaan wewenang	Melindungi dari penyalahgunaan wewenang
62	User dan Password Email Domain/OPD/ASN	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 25; - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan huruf j;	Selama masih digunakan	Menghindari penyalahgunaan wewenang	Melindungi dari penyalahgunaan wewenang
63	Kajian Teknis penetapan lokasi dan basic design pengadaaan tanah untuk kepentingan umum/ non kepentingan umum	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf e dan huruf i; - PP Nomor 19 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum	Sampai terbitnya surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Melindungi ketahanan ekonomi nasional
64	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/appraisal untuk pengadaaan tanah	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf e dan huruf i; - PP Nomor 19 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum	Sampai dengan selesainya proses pengadaaan tanah	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Melindungi ketahanan ekonomi nasional
65	Berita sandi	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c angka 6;	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan ketahanan negara
66	Data spesifikasi sarana komunikasi sandi	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c angka 6;	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan ketahanan negara
67	Penempelan jaringan, peralatan sandi dan tempet kegiatan sandi	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c angka 6;	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan ketahanan negara

69	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c angka 6;	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan ketahanan negara
70	Berita/radiogram rahasia	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c angka 6;	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan ketahanan negara
71	Informasi data pribadi Pelanggaran Perda yang sedang ditangani PPNS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan huruf i;	Sampai dengan selesainya proses penanganan perkara	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
72	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan huruf i;	Sampai selesai kasusnya	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan menghambat kesuksesan penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan
73	Informasi data pribadi penegakan perda	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i;	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi penegak perda	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan serta melindungi rahasia pribadi penegak hukum

74	Berita acara pemeriksaan	- UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i;	Selama proses pemeriksaan	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia orang yang diperiksa	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan serta melindungi rahasia pribadi orang yang diperiksa
75	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan huruf i;	Sampai Keluar Putusan Pengadilan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum

  
**WALIKOTA PARIAMAN,**  
**GENIUS UMAR**

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
MAYORALD PARIAMAN	16/5-21
KABUPATEN ADMINISTRASI PERENCANAAN UPTM	15/5
BAGIAN HUKUM & HAM	
BUSUBAG PERUNDANG MENDANGAN	15/5-21